

PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIS PEDESAAN DI INDONESIA

Abstract

In 2014, the Indonesian government issued Law No. 6 of 2014 concerning Villages, a form of state recognition of villages, specifically in clarifying village authority and functions and strengthening the position of towns and village communities as development targets. One of the objectives of this Village Fund policy is to reduce the rural poverty level in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as the central government's effort in poverty alleviation programs and reducing inequality between rural and urban poverty. In the last nine years, rural poverty has always been higher than urban poverty. This study uses panel data from 514 districts/cities in Indonesia from 2010 to 2018. The results show that in 2015-2018, the Village Fund Policy impacted rural poverty levels using the fixed-effect estimation method. In terms of magnitude, it may signal the inefficiency of the policy. On the other hand, in contrast to Village Fund (DD – Dana Desa), another source of village revenues such as Financial Assistance (BK – Bantuan Keuangan), the transfer fund from district/city governments and provincial government, have a more significant effect on rural poverty.

Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111
Telp/Fax: (0651) 7551265
Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

©2021 FEB Unsyiah. All rights reserved.

Nisa Erma Fitriana ¹

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
E-mail: nisaerma04@gmail.com

Riatu Mariatul Qibthiyyah ²

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
E-mail: prcrmqx@gmail.com

Keywords:

Analisis Kemiskinan, Transfer Antar
Level Pemerintah, Regresi Data Panel

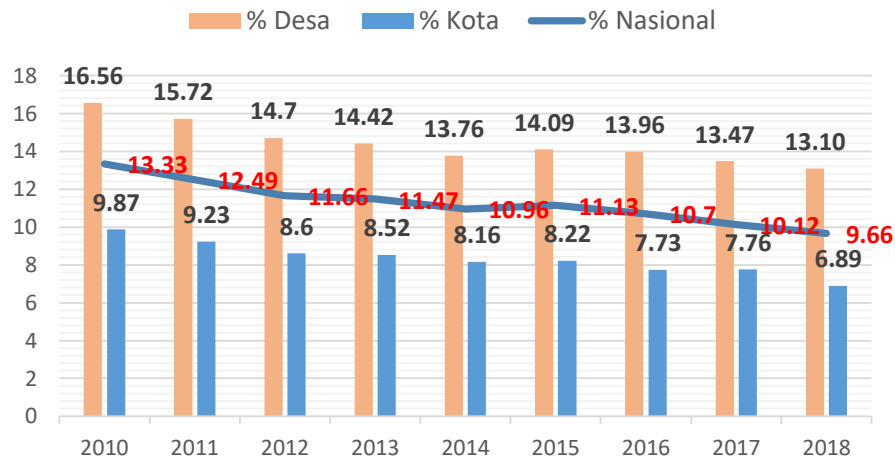
INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 15 Februari 2021
Diterima setelah revisi: 19 Mei 2021
Diterima: Mei 2021
Dipublikasi: Mei 2021

¹ Nisa Erma Fitriana adalah corresponding author

1. Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia dan merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs - Sustainable Development Goals*) sebuah negara. Di Indonesia, pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu indikator pembangunan dalam satu dekade terakhir mengalami perbaikan. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir angka kemiskinan nasional cenderung menurun, namun masih dibutuhkan solusi untuk mengatasi tingkat kemiskinan di pedesaan yang memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber: BPS, 2019

Beberapa studi memandang bahwa kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengurangi kemiskinan pedesaan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dapat mengacu pada belanja pemerintah, atau karena tergantung pada tatanan fungsional lintas tingkatan pemerintahan, dapat pula dalam bentuk transfer antar level pemerintah. Penelitian Fan et al. (2000) beranggapan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur pedesaan seperti jalan desa dan irigasi serta pendidikan memiliki pengaruh pada penurunan kemiskinan pedesaan. Higgins (2012) beranggapan bahwa kebijakan transfer yang dilakukan pemerintah cenderung memiliki dampak yang lebih tinggi pada tingkat kemiskinan pedesaan daripada perkotaan. Selanjutnya menurut Ahluwalia (2007), Datt & Ravallion (1998), dan Pandey et al. (2012) menunjukkan bahwa produktivitas pertanian yang lebih tinggi dapat membawa keuntungan bagi rumah tangga miskin pedesaan. Di sisi lain, Padda & Hameed (2018) dan Aref (2011) menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang lebih tinggi akan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat tidak

hanya dapat dilakukan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota namun dapat dilakukan ke pemerintah tingkat desa. Hal ini diperkuat dengan adanya transfer ke tingkat desa. Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dari sisi belanja (*expenditure*) didefinisikan sebagai suatu proses penyaluran anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pemerintah dalam hal pelayanan publik (Kurniasih, 2013). Terkait efektivitas desentralisasi fiskal untuk mengurangi kemiskinan, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Valaris, 2012; Adefeso, 2017; Balisacan & Pernia, 2002; Faridi & Nazar, 2013). Penelitian lainnya beranggapan bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat menyelesaikan kemiskinan (Azfar & Livingston, 2007; Moche et al., 2014; Hernandez-Trillo, 2016; Alene & Worku, 2017; Bird & Rodriguez, 1999; Jütting et al., 2004).

Dana Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mulai berlaku pada masa pemerintahan Jokowi-JK dengan menitikberatkan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan wujud dari program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa bersumber dari dana APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa penelitian terkait Dana Desa dan hubungannya dengan kemiskinan. Terdapat hasil yang berbeda dalam literatur empiris. Penelitian yang dilakukan Anam (2017) menganalisis dampak penyaluran Dana Desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Bangkalan. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan masyarakat desa dan menggunakan variabel bebas Dana Desa per kapita. Menggunakan data *cross section* pada 80 desa sampling tahun 2016 penelitian ini menyatakan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Selanjutnya Ekayuliana et al. (2019) menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. Populasi penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berupa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena Dana Desa untuk infrastruktur lebih

tinggi penggunaannya daripada untuk pemberdayaan dimana pemberdayaan langsung menyentuh target orang miskin sehingga mereka bisa mengurangi kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan Hermawan et al. (2019) melakukan analisis pengaruh penerapan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana desa terhadap jumlah kemiskinan di daerah pedesaan di tingkat provinsi di Jawa. Penelitian ini menggunakan data panel di 5 provinsi di Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi *fixed effect*. Hasilnya menunjukkan Dana Desa memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan pedesaan. Peningkatan Dana Desa sebesar 1 persen akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,0093 persen.

Rachma et al. (2019) mengukur dampak kontribusi kebijakan pemerintah terhadap paradigma 'membangun Indonesia dari pinggiran', yaitu kontribusi Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan desa di Indonesia. Variabel tak bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia dan menggunakan variabel bebas Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Menggunakan data panel dengan metode *Least Squares Panel* (PLS), hasilnya menunjukkan bahwa Dana Desa secara optimal melawan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Sigit Angga (2018) melakukan analisa pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin dan menggunakan variabel bebas Dana Desa (dalam juta). Menggunakan data panel seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017 hasilnya menunjukkan pengaruh negatif sesuai dengan hasil regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika Dana Desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun.

Berdasarkan literatur empiris, sebagian besar penelitian yang ada merupakan studi kasus yang terbatas pada pengkajian Dana Desa di wilayah tertentu. Terdapat satu penelitian terkait Dana Desa yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia namun penelitian tersebut menggunakan data kemiskinan secara umum, menggabungkan kemiskinan desa dan kota, dan tidak mengacu pada kemiskinan pedesaan secara spesifik. Kemiskinan pedesaan merupakan indikator yang lebih tepat terhadap hasil yang diharapkan dari kebijakan Dana Desa karena berdasarkan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa diperuntukkan bagi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus apakah terdapat pengaruh Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan menggunakan data level kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018. Dengan adanya penelitian dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan informasi mengenai pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu kondisi multidimensi. Menurut Nafziger (2006) terdapat lima dimensi menonjol dalam definisi kemiskinan. Pertama, kemiskinan terdiri dari banyak dimensi yang saling terkait. Kemiskinan tidak selalu dikaitkan dengan kurangnya suatu hal, namun kemiskinan selalu dikaitkan dengan rasa lapar atau kekurangan makanan. Kedua, kemiskinan memiliki dimensi penting psikologis, seperti ketidakberdayaan, tidak dapat memberikan pendapat, ketergantungan, rasa malu, dan kerendahan hati. Adanya norma sosial akan solidaritas di masyarakat dapat membantu orang miskin untuk terus percaya pada sisi kemanusiaan mereka sendiri. Ketiga, orang miskin kekurangan akses ke infrastruktur dasar seperti jalan raya (terutama di pedesaan wilayah), transportasi, dan air bersih. Keempat, orang miskin sadar bahwa pendidikan menawarkan jalan keluar dari kemiskinan, namun hal tersebut dapat terjadi hanya jika lingkungan ekonomi mendukung. Kelima, kesehatan yang buruk merupakan sumber kemelaratan yang selalu dikaitkan dengan orang miskin. Hal ini berkaitan dengan biaya perawatan kesehatan yang tinggi sehingga orang miskin dapat kehilangan pekerjaan karena sakit.

Suryawati (2005) membagi kemiskinan kedalam empat jenis yaitu pertama, kemiskinan absolut terjadi jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja; kedua, kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan adanya faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki taraf hidup, malas, tidak kreatif, dan lain sebagainya; dan keempat, kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

2.1.1 Kemiskinan Absolut

Tingkat kemiskinan absolut dikategorikan sebagai sejumlah orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Todaro (2015) tingkat kemiskinan absolut dihitung sebagai jumlah total orang yang hidup dibawah minimum pendapatan riil yang telah ditentukan garis kemiskinan internasional. Dalam menghitung tingkat garis kemiskinan absolut, Bank Dunia

(World Bank) menggunakan pengeluaran konsumsi masyarakat yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*/Paritas Daya Beli). Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kemiskinan yang mutlak terjadi pada suatu masyarakat yang memiliki standar hidup minimum dan diwujudkan kedalam sebuah garis kemiskinan. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Di tingkat nasional, mengingat tujuan pemerintah adalah kemiskinan absolut, umumnya lebih berfokus pada daerah perkotaan, di mana individu yang menjadi sasaran (mungkin) mudah diakses dan merupakan lokasi tujuan penyaluran bantuan. Dalam hal ini, sebagian besar belanja pemerintah akan diarahkan ke daerah perkotaan sehingga kurang memprioritaskan daerah pedesaan (Todaro, 2015).

Kemiskinan telah memberikan dampak seperti kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, akses air dan sanitasi yang buruk. Fenomena ini sangat mudah ditemukan di daerah pedesaan di negara-negara berpenghasilan rendah dimana sebagian besar orang miskin tinggal. Fakta lain yaitu aliran bantuan resmi ke daerah pedesaan telah menurun dan dukungan terhadap ekonomi pedesaan seperti pembangunan pertanian telah melambat (Okidegbe, 2001). Hakim & Zuber (2008) menangkap beberapa faktor penyebab kemiskinan desa antara lain yaitu minimnya pengetahuan masyarakat desa akan teknologi, kewirausahaan yang masih lemah, dan jarak desa ke pusat pemerintahan (kecamatan) relatif jauh yang berarti semakin jauh jarak desa ke pusat pemerintahan maka kemiskinan akan semakin besar. Penelitian Pajriah & Suryana (2018) berpendapat lain terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan di desa antara lain masyarakat miskin desa tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hanya menunggu bantuan dari pihak lain dan pendidikan masyarakat desa yang cenderung rendah. Njenga & Davis (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keterbatasan transportasi menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya suatu desa. Menurut penelitian ini transportasi diperlukan dalam mencapai berbagai tujuan termasuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan pribadi, pemerintahan dan pemberdayaan serta keamanan.

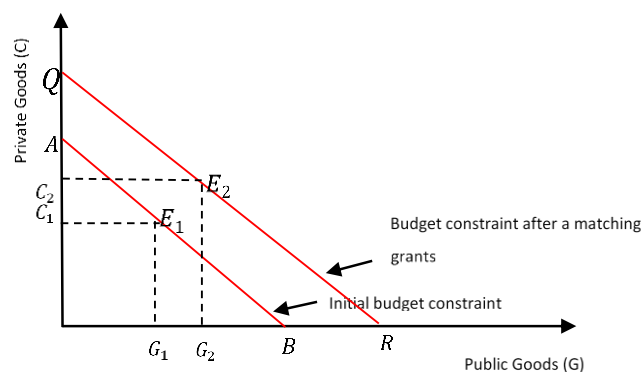
Pembangunan ekonomi khususnya sektor pertanian di pedesaan pada umumnya memainkan peran dalam kemajuan ekonomi secara keseluruhan terutama pada negara berkembang yang berpendapatan rendah. Strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan lapangan kerja membutuhkan 3 elemen, yaitu: (1) percepatan pertumbuhan pengeluaran melalui teknologi, kelembagaan, dan harga yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani pada tingkat menengah kebawah, (2) meningkatnya permintaan domestik untuk hasil pertanian yang berasal dari strategi pembangunan perkotaan berorientasi pekerjaan, (3) kegiatan pembangunan pedesaan

yang beragam, nonpertanian, padat karya yang secara langsung dan tidak langsung mendukung dan didukung oleh komunitas pertanian (Todaro, 2015).

2.2 Teori Transfer Antar Level Pemerintah

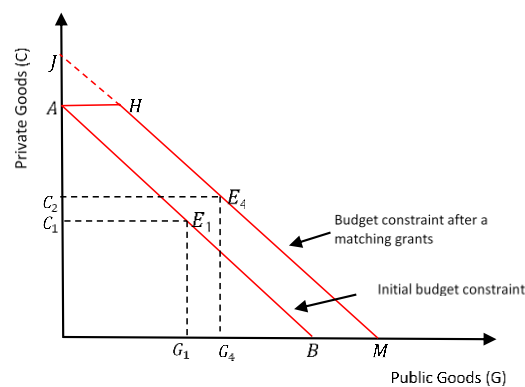
Sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah adalah pendapatan pajak (*tax revenue*) dan transfer antar level pemerintah (*intergovernmental transfer*) (Bergvall et al, 2006). Adapun tujuan transfer antar level pemerintah ini yaitu untuk pemerataan vertikal, pemerataan horisontal, mengatasi persoalan efek pelayanan publik, mengarahkan prioritas, melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilisasi, dan kewajiban untuk mewujudkan tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Fuad, 2004). Rosen dan Gayer (2010) membagi transfer antar level pemerintah ke dalam dua jenis transfer yaitu transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) dan transfer bersyarat (*conditional grants*). Transfer tidak bersyarat (*unconditional grants/ general purpose grants/ block grants*) merupakan transfer yang tidak ada pembatasan pada penggunaan alokasi dana oleh pemerintah daerah namun tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Gambar 2 menjelaskan bagaimana transfer tidak bersyarat dapat memperluas pilihan dan jumlah barang publik dan barang privat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk komunitas tertentu. Pada Gambar 2, kurva anggaran penerima transfer meningkat sejumlah dana yang diberikan ($C_1C_2 = G_1G_2$), dimana *budget line* akan berubah dari AB (sebelum menerima transfer) ke QR (setelah menerima transfer). Di tingkat komunitas, akan ada peningkatan kesejahteraan komunitas masing-masing, baik pada level individu dan atau rumah tangga. Adanya transfer memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi lebih banyak barang publik dan barang privat.



Gambar 2. Kurva transfer tidak bersyarat.
Sumber: Rosen dan Gayer (2010)

Kebijakan Dana Desa di Indonesia secara umum dapat dikategorikan sebagai transfer bersyarat tanpa dana pendamping (*conditional non-matching grant*) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 dibawah ini. Gambar 3 menunjukkan bagaimana pemerintah pusat memberikan transfer sebesar AH kepada pemerintah daerah di mana pemerintah pusat telah menetapkan tujuan khusus penggunaan dana. Adanya transfer akan menimbulkan efek pendapatan (Stiglitz, 2015). Bagi pemerintah daerah, transfer ini dapat dipandang sebagai anggaran tambahan yang dapat digunakan untuk menyediakan barang publik yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Garis anggaran AHM menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi barang publik akibat adanya penambahan transfer dari pemerintah pusat.

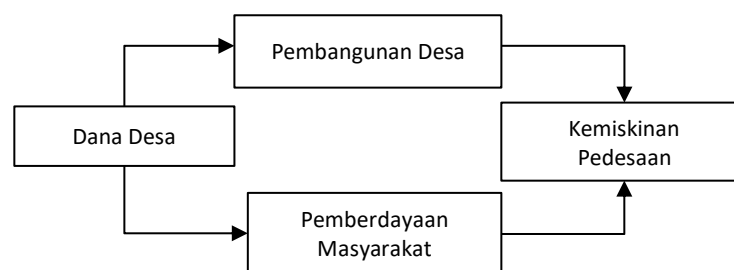


Gambar 3. Kurva transfer bersyarat tanpa dana pendamping
Sumber: Rosen dan Gayer (2010)

Sebagai catatan, transfer bersyarat (*conditional grants/ specific purpose grants/ categorical grants*) merupakan transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah pusat mengatur pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Pemerintah pusat menentukan tujuan spesifik dalam penggunaan dana transfer bersyarat tersebut. Transfer bersyarat dari pemerintah pusat biasanya digunakan untuk program yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Transfer bersyarat dibagi menjadi transfer dengan dana pendamping (*matching grants*) dan transfer tanpa dana pendamping (*non-matching grants*). Baik *matching grants* dan *non-matching grants* merupakan transfer dimana penerima transfer tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk aktivitas lainnya. Yang menjadi perbedaan, *matching grants* menggunakan dana pendamping dari daerah penerima transfer, sedangkan *non-matching grants* merupakan jenis transfer yang tidak menggunakan dana pendamping dari daerah penerima transfer. Dana desa diklasifikasikan sebagai transfer tanpa dana pendamping karena dalam penyaluran dananya, pemerintah daerah yang merujuk ke desa tidak perlu menyediakan dana pendamping

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka teori pada penelitian ini dibangun berdasarkan teori transfer antar level pemerintah yang dikembangkan oleh Rosen dan Gayer (2010). Berdasarkan kualifikasi jenis transfer pada subbab 2.2 diatas, Dana Desa diklasifikasikan sebagai transfer bersyarat tanpa dana pendamping (*conditional non-matching grants*). Sebab dalam penyalurannya tidak terdapat dana pendamping yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna mendukung kebijakan Dana Desa, dan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah. Dana transfer berupa Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat akan menyebabkan efek pendapatan untuk pemerintah daerah, dimana instutusi memperoleh tambahan anggaran yang dapat digunakan penyediaan barang publik yang dapat diakses oleh masyarakat lokal atau dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Barang publik lokal tersebut merupakan infrastruktur dan layanan publik dasar yang dibutuhkan penduduk lokal terutama masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat berdampak pada peluang orang untuk terlibat dalam kegiatan produktif.



Gambar 4. Kerangka pemikiran analisis pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Pedesaan

Dengan begitu terlihat bahwa sejauh Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan daerah yang berupa layanan publik yang efisien yang dapat diakses oleh penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa maka terdapat ruang untuk mengurangi kemiskinan (Todaro, 2015).

3. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Estimasi

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan periode waktu dari tahun 2010 hingga 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel

yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Tingginya jumlah observasi pada data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan model, antara lain *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE).

Pengujian kesesuaian model dilakukan dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, serta Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model yang paling tepat. Uji Chow digunakan untuk menentukan model apakah *Common Effect* (CE) atau *Fixed Effect* (FE) yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Selanjutnya Uji Hausman digunakan untuk menentukan model antara *Random Effect* (RE) atau *Fixed Effect* (FE). Sedangkan Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model apakah *Common Effect* (CE) atau *Random Effect* (RE) yang paling tepat digunakan.

3.2 Model Penelitian

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dijelaskan dan tujuan dari penelitian ini, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} POV_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 DD_{it-1} + \alpha_2 ADD_{it-1} + \alpha_3 ratio_PAD_{it-1} + \alpha_4 BK_{it-1} + \alpha_5 APBD_{it-1} + \\ & \alpha_6 ratio_BM_{it-1} + \alpha_7 PDRB_{it} + \alpha_8 growth_popdes_{it} + \alpha_9 popdes_{it} + \alpha_{10} ratio_labor_{it} + \\ & \alpha_{11} ratio_old_{it} + \alpha_{12} educ_{it} + \alpha_{13} raskin_{it} + \beta_1 Dummy_tahun_t + \\ & \beta_2 Dummy_pulau_tahun_{it} + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

dimana:

POV_{it}	: Jumlah penduduk miskin pedesaan (dalam orang)
α_0	: Intersep
$\alpha_1 \dots \alpha_n$: Koefisien regresi
$\beta_1 \dots \beta_n$: Koefisien regresi
DD_{it-1}	: Dana Desa (dalam miliar rupiah)
ADD_{it-1}	: Alokasi Dana Desa (dalam miliar rupiah)
$ratio_PAD_{it-1}$: Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa (dalam persen)
BK_{it-1}	: Bantuan Keuangan (dalam miliar rupiah)
$APBD_{it-1}$: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sisi Penerimaan) (dalam miliar rupiah)
$ratio_BM_{it-1}$: Rasio Belanja Modal terhadap Pengeluaran Kabupaten/Kota (dalam persen)

$PDRB_{it}$: Produk Domestik Regional Bruto (dalam miliar rupiah)
$growth_popdes_{it}$: Laju pertumbuhan penduduk desa (dalam persen)
$popdes_{it}$: Jumlah penduduk desa (dalam orang)
$ratio_labor_{it}$: Rasio tenaga kerja desa pada sektor pertanian terhadap tenaga kerja non pertanian (dalam persen)
$ratio_old_{it}$: Rasio penduduk usia lanjut desa yang memasuki usia 60 tahun keatas terhadap penduduk desa (dalam persen)
$educ_{it}$: Jumlah penduduk desa dengan latar belakang pendidikan yang memiliki ijazah setingkat SMA/ sederajat (dalam orang)
$raskin_{it}$: Jumlah penduduk desa yang pernah membeli/menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra) (dalam orang)
$Dummy_tahun_t$: Dummy tahun
$Dummy_pulau_tahun_{it}$: Dummy pulau tahun
i	: Kabupaten/kota
t	: Periode waktu (tahun)

Karakteristik wilayah sesuai kebutuhan juga dikontrol. Variabel keuangan pada penelitian ini seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bantuan Keuangan, APBD, Belanja Modal menggunakan lag pertama (t-1) dengan pertimbangan bahwa dampak transfer pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pedesaan tidak dapat dilihat langsung dalam periode sama.

Pada model ditambahkan *dummy* tahun untuk mengontrol variasi antar waktu (*time trend*) dimana nilai 0 digunakan untuk tahun sebelum berlakunya kebijakan Dana Desa (2010 s.d 2014) dan nilai 1 untuk tahun setelah berlakunya kebijakan Dana Desa (2015 s.d 2018). Selanjutnya *dummy* pulau ditambahkan untuk mengontrol karakteristik wilayah antar pulau yang diinteraksikan dengan *time trend* menjadi *dummy* pulau_tahun. *Dummy* pulau terbagi menjadi tujuh kelompok pulau besar yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Kemiskinan (POV) adalah kemiskinan absolut sebagai kemiskinan yang mutlak terjadi pada suatu masyarakat yang memiliki standar hidup minimum dan diwujudkan kedalam sebuah garis kemiskinan (BPS,2019). BPS mengkategorikan seseorang sebagai penduduk miskin jika memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005).

Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014).

Bantuan Keuangan (BK) adalah dana transfer yang berasal APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota (Undang-undang No.6 Tahun 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Modal (BM) adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (BPS, 2019).

Laju Pertumbuhan Penduduk Desa adalah tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu (BPS, 2019).

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2019)

Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2019)

Penduduk Usia Lanjut adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Tingkat Pendidikan adalah Pendidikan Formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Undang-undang No.20 Tahun 2003).

Beras Masyarakat Miskin (*raskin*) adalah Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan dengan unit analisis penelitian pada level kabupaten/kota dan periode

penelitian dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini telah mencerminkan pedesaan.

Variabel tak bebas yang berupa jumlah penduduk miskin pedesaan (POV) diperoleh dengan mengolah data yang berasal dari Modul Konsumsi Susenas BPS. Data penduduk miskin ini didapat dengan mengkategorikan individu-individu desa yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan kabupaten/kota. Selanjutnya, variabel bebas Dana Desa (DD) merupakan realisasi anggaran Dana Desa yang berasal dari Kementerian Keuangan dari tahun 2015 hingga 2018.

Variabel penjelas keuangan desa lainnya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa (ratio_PAD), dan Bantuan Keuangan (BK) berasal dari publikasi BPS Statistik Keuangan Pemerintah Desa dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Selanjutnya data rasio belanja modal kabupaten/kota terhadap pengeluaran daerah kabupaten/kota (ratio_BM) dan total pendapatan daerah kabupaten/kota (APBD) diperoleh dari Kementerian Keuangan dari tahun 2010 sampai dengan 2018.

Variabel PDRB yang digunakan merupakan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota yang berasal dari publikasi BPS Tinjauan Regional berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2010 sampai dengan 2018.

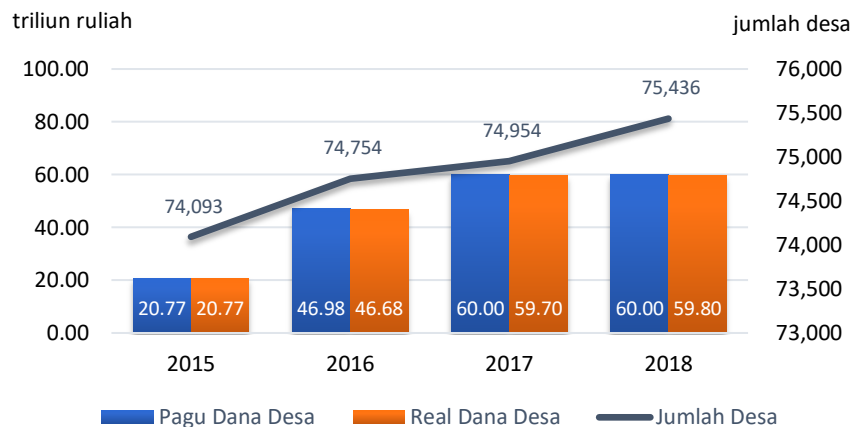
Variabel yang melihatkan kependudukan desa seperti laju pertumbuhan penduduk desa (growth_popdes), jumlah penduduk desa (popdes), penduduk usia lanjut (old), tingkat pendidikan (educ), program raskin diperoleh menggunakan data Susenas BPS tahun 2010 sampai dengan 2018. Variabel rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap tenaga kerja non pertanian (ratio_labor) diperoleh menggunakan data Sakernas BPS dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan mengkategorikan individu-individu desa yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu lalu dengan lapangan usaha/bidang pekerjaan sektor pertanian. Variabel penduduk usia lanjut (old) diperoleh dengan mengkategorikan penduduk desa dengan usia 60 tahun keatas, sedangkan tingkat pendidikan (educ) mencerminkan jumlah penduduk desa dengan latar belakang pendidikan yang memiliki ijazah setingkat SMA/ sederajat.

Variabel program beras masyarakat miskin (raskin) diperoleh menggunakan data Susenas BPS dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan mengkategorikan penduduk desa yang pernah membeli/menerima beras miskin/beras sejahtera.

3.5 Dana Desa

Kebijakan Dana Desa telah menjadi program pengentasan kemiskinan berbasis desa terbesar dari pemerintah pusat dibandingkan dengan program-program pengentasan kemiskinan lainnya

seperti subsidi raskin, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan, atau PKH (Program Keluarga Harapan). Kebijakan Dana Desa merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menempatkan Desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, pemerintah pusat setiap tahunnya telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN seperti yang terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Pagu dan Realisasi Dana Desa dan Jumlah Desa Tahun 2015-2018

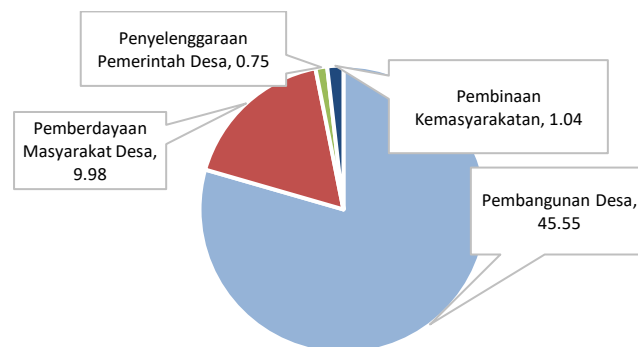
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2019

Pada awal kemunculan kebijakan Dana Desa tahun 2015, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 247/PMK.07/2015 formula distribusi Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota dialokasikan sesuai prinsip pemerataan dan berkeadilan (PP 60/2014) yang terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan bobot masing-masing sebesar 90% dan 10%. Alokasi Dasar merupakan porsi alokasi yang dibagi sama rata ke kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa di kabupaten/kota. Sedangkan Alokasi Formula sebesar 10% dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penelitian yang dilakukan Lewis (2015) yang berjudul *“Decentralising To Villages In Indonesia: Money (And Other) Mistakes”* berpendapat bahwa terdapat ketidakefektifan dalam formula pengalokasian Dana Desa. Penelitian ini menangkap dua fokus kesalahan utama dalam formula penganggaran Dana Desa. Pertama, terdapat prosedur yang salah dimana Alokasi Dasar menjadi mayoritas dalam formulasi Dana Desa, sedangkan Alokasi Formula yang melihat karakteristik tiap daerah hanya diberikan porsi kecil yaitu sebesar 10%. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki heterogenitas yang tinggi, sebagai contoh geografis yang berbeda antar pulau. Kedua, dalam proses penganggaran Dana Desa mengabaikan sumber pendapatan desa

lainnya yang masuk ke pemerintah desa. Kajiannya menemukan bahwa besaran alokasi yang diterima pemerintah daerah sebanding dengan jumlah desa sehingga kabupaten/kota akan mendapat porsi Dana Desa lebih besar ketika memiliki jumlah desa lebih banyak dan kapasitas fiskal desa yang besar.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat tujuan spesifik penggunaan Dana Desa yang melekat pada program-program yang disampaikan. Berdasarkan PP 60/2014, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan UU 6/2014, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan.



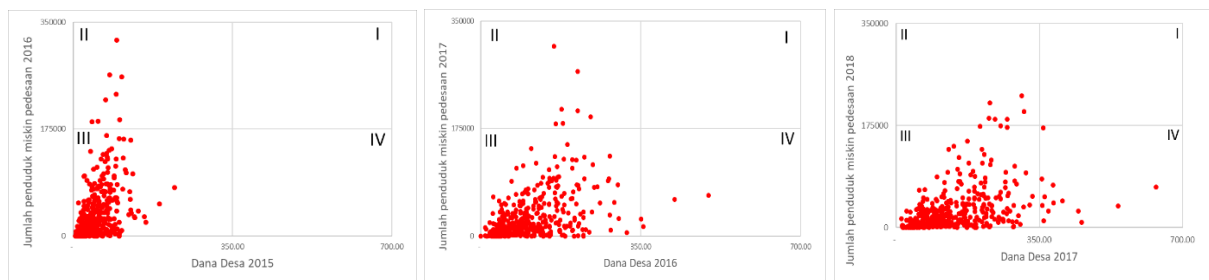
Gambar 6. Realisasi Empat Bidang Dana Desa Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

Sumber: Ditjen PPMD Kemedesa, 2019

Terlihat pada Gambar 6 diatas, pada tahun 2018, sebagian besar realisasi anggaran Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Inovasi, kreativitas, dan kerjasama yang baik antara perangkat desa dengan masyarakatnya masing-masing merupakan kunci sukses untuk program pembangunan desa yang efektif dan dapat terjadi jika masyarakat desa masih memiliki keleluasaan dalam menggunakan Dana Desa. Masyarakat desa diharapkan mampu untuk mengelola sumber dayanya dan melaksanakan program pembangunan desa sehingga kesejahteraan masyarakat desa diharapkan meningkat dari program pembangunan desa tersebut.

Gambar 7 menunjukkan diagram sebar (*scatterplot*) antara Dana Desa dan jumlah penduduk miskin pedesaan. Untuk diketahui, Dana Desa yang diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota diamati pada periode $t-1$ dan jumlah penduduk miskin pedesaan pada periode t

dengan menggunakan analisis diagram kartesius empat kuadran. Oleh karena itu, Dana Desa yang digunakan adalah tahun 2015, 2016, dan 2017 sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan di masing-masing kabupaten/kota mengacu pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Sekilas dalam pemetaan menunjukkan alokasi Dana Desa telah meningkat untuk sebagian besar pemerintah kabupaten/kota, dan juga terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2015 hingga 2018 terjadi pergeseran antar kuadran di beberapa kabupaten/kota. Beberapa titik berpindah dari kuadran II (jumlah penduduk miskin pedesaan tinggi, dan alokasi dana desa rendah) ke kuadran III (jumlah penduduk miskin pedesaan rendah dan alokasi dana desa rendah) dan atau ke kuadran IV (jumlah penduduk miskin pedesaan rendah dan alokasi dana desa yang tinggi). Diagram sebar ini belum tentu memberi tahu kita bahwa mungkin terdapat hubungan antara alokasi Dana Desa dan pengurangan kemiskinan pedesaan.



Gambar 7. Pemetaan Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan 2015-2018

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2019

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengujian Kesesuaian Model

Pengujian kesesuaian terhadap model yang dibangun digunakan untuk menentukan model yang paling tepat. Langkah pertama yaitu melakukan uji Chow untuk menentukan antara *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM) dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan kesimpulan model terbaik seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Kesesuaian Model

Uji	Hipotesis	P Value	Keputusan
Uji Chow	$H_0 = \text{CEM}$	0,0000	FEM
	$H_1 = \text{FEM}$		
Uji Hausman	$H_0 = \text{REM}$	0,0000	FEM
	$H_1 = \text{FEM}$		

Sumber: Hasil regresi, 2019

Berdasarkan uji Chow yang telah dilakukan, nilai p-value adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$ maka H_1 diterima yang artinya model yang dipilih adalah *fixed effect model*, dengan demikian akan dilanjutkan uji Hausman. Berdasarkan uji Hausman, nilai p-value sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,01$ maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

4.2 Hasil Analisis Data Panel

Model A dan model B pada Tabel 2 menampilkan hasil regresi dengan menggunakan metode *fixed effect*. Kedua model menggunakan variabel tak bebas yaitu jumlah penduduk miskin pedesaan dan variabel bebas yaitu Dana Desa beserta variabel kontrol lainnya, serta ditambahkan *dummy* tahun untuk mengontrol variasi antar waktu (*time trend*). Satu hal yang berbeda, pada model B ditambahkan *dummy* pulau_tahun untuk mengontrol variasi wilayah antar pulau antar tahun.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 2, lag pertama kebijakan Dana Desa berhubungan negatif dan signifikan pada tingkat 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan. Dampak negatif kebijakan Dana Desa terhadap angka kemiskinan pedesaan sejalan dengan penelitian Higgins (2012) yang berpendapat bahwa kebijakan transfer pemerintah cenderung berdampak lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan.

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan

	Model A	Model B
	FE POV	FE POV
L1.DD	-53.111*** (12.451)	-60.351*** (12.285)
L1.ADD	-45.448** (20.110)	-55.564*** (20.439)
L1.ratio_PAD	57.464 (60.586)	-63.724 (60.661)
L1.BK	-173.161*** (22.834)	-125.739*** (23.060)
L1.APBD	-10.300*** (2.046)	-4.427** (2.056)
L1.ratio_BM	-51.180 (69.930)	-1.942 (70.853)
PDRB	-0.192	0.126

	(0.165)	(0.163)
growth_popdes	54.502 (49.989)	33.259 (48.612)
popdes	0.098*** (0.024)	0.100*** (0.023)
ratio_labor	0.327* (0.197)	0.430** (0.192)
ratio_old	-3087.478*** (784.864)	326.287 (836.922)
educ	-0.862*** (0.078)	-0.715*** (0.076)
raskin	0.043*** (0.006)	0.050*** (0.007)
_cons	80271.853*** (8381.056)	34368.873*** (9551.156)
<i>N</i>	3649	3649
<i>r</i> ²	0.421	0.477
<i>r</i> ² _a	0.330	0.387
<i>F</i>	114.615	45.732
<i>P</i>	0.000	0.000
Dummy_tahun	yes	yes
Dummy_pulau_tahun	no	yes

Angka dalam tanda kurung adalah Standard Error (SE).

*** = tingkat signifikansi 1%;

** = tingkat signifikansi 5%;

* = tingkat signifikansi 10%.

Sumber: Hasil regresi, 2019

Catatan: sudah dilakukan pengecekan robustness pada model di Tabel 3 (lihat Lampiran 1) dengan mengganti variabel tak bebas menjadi persentase penduduk miskin pedesaan. Hasil estimasi menunjukkan adanya konsistensi tanda koefisien variabel Dana Desa yang selalu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian sudah robust.

Pengujian Restriksi Persamaan Linier dengan Pendekatan Uji F (Gujarati, 2016) dilakukan yang untuk membandingkan dua model antara model A dan model B. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,96 dan F_{tabel} sebesar 1,91 pada level signifikansi 5% maka F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sehingga tolak H_0 dan model terbaik dalam penelitian ini adalah Model B (Lampiran 2) dimana dalam model ini telah memasukkan *dummy* pulau_tahun yang mengontrol karakteristik kabupaten/kota antar pulau antar tahun.

Meskipun Dana Desa terlihat berhubungan negatif dan signifikan pada tingkat 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan, namun terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana peningkatan Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota pada periode t-1 hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 60 orang pada periode t. Hasil ini tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya berupa Bantuan Keuangan (BK) dimana peningkatan Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota pada periode t-1 dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 125 orang pada periode t. Adanya ketidakefektifan pada hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) yang menganggap terdapat kesalahan dalam formula penyusun Dana Desa, dimana besaran Dana Desa aktual yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota sebagian besar didominasi oleh Alokasi Dasar sebesar 90% dan hanya memberikan porsi sedikit pada Alokasi Formula (10%) yang memperhatikan heterogenitas daerah.

Sejalan dengan teori transfer antar level pemerintah, mungkin terdapat kasus di mana persyaratan penggunaan Dana Desa menghambat efektivitas penanggulangan kemiskinan pedesaan. Terdapat kemungkinan jika program yang dipilih kurang ideal atau tidak hemat biaya dalam hal pengentasan kemiskinan. Namun demikian, bisa juga terjadi sebaliknya, di mana program pembangunan desa memang berdampak pada kemiskinan pedesaan, misalnya karena target dan desain program yang lebih baik yang dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan lainnya. Hal ini terlihat pada hasil estimasi yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa lainnya yang berupa Bantuan Keuangan cenderung dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan pedesaan yang lebih efektif.

Tujuan penggunaan Dana Desa telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan khusus penggunaan Dana Desa akan meningkatkan pelayanan dasar yang dapat diakses oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat miskin pedesaan dan berdampak pada peningkatan kepuasan individu. Menurut teori kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Rosen & Gayer (2010), fungsi kesejahteraan merupakan fungsi yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang bagaimana kepuasan individu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Variabel kontrol dalam penelitian ini berdasarkan hasil estimasi memiliki pengaruh yang beragam. Beberapa variabel yang memiliki pengaruh dalam pengurangan jumlah penduduk miskin pedesaan antara lain adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota,

Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, APBD Kabupaten/Kota, dan pendidikan penduduk desa.

Variabel Alokasi Dana Desa berdasarkan hasil estimasi berhubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Hal ini menunjukkan jika terdapat peningkatan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar pada periode t-1 maka jumlah penduduk miskin pedesaan akan turun sebesar 55 orang pada periode t. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Angga (2018) yang menyatakan bahwa jika Alokasi Dana Desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun. Selanjutnya variabel Bantuan Keuangan yang merupakan dana transfer yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota berhubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Berdasarkan hasil estimasi Bantuan Keuangan memiliki pengaruh penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan terbesar seperti yang terlihat pada nilai koefisien hasil regresi dimana peningkatan Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota pada periode t-1 dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 125 orang pada periode t. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sayed Syahril (2015) yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Baik Alokasi Dana Desa maupun Bantuan Keuangan merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah daerah, dimana menurut Stiglitz (2015) pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat dan memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan layanan secara efisien.

Selanjutnya, variabel APBD Kabupaten/Kota berhubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Anwar et al. (2016) yang berpendapat bahwa alokasi anggaran pemerintah yang diterima secara bersama-sama memberi kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung. Koefisien hasil regresi menunjukkan peningkatan APBD sebesar Rp 1 miliar pada periode t-1 hanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 4 orang pada periode t. Hal ini mungkin terjadi karena porsi komposisi APBD yang berdampak langsung pada proses pengentasan kemiskinan pedesaan hanya sebagian kecil dari keseluruhan anggaran. Menurut Kementerian Keuangan komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Variabel lainnya yang dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan desa adalah pendidikan penduduk desa, dalam hal ini penduduk desa yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan hasil estimasi variabel pendidikan penduduk desa berhubungan negatif dan signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aref (2011) dimana terdapat kontribusi pendidikan dalam pengurangan kemiskinan. Menurut penelitian ini pendidikan akan mempengaruhi keahlian dan produktivitas tenaga kerja. Adanya *skill* individu yang lebih baik akan berdampak pada lebih tingginya pendapatan yang diperoleh sehingga akan berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut.

Beberapa variabel dalam penelitian ini seperti Pendapatan Asli Desa, Belanja Modal Kabupaten/Kota, PDRB Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan penduduk desa, jumlah penduduk desa, tenaga kerja sektor pertanian, penduduk tua pedesaan, dan program raskin berdasarkan hasil estimasi cenderung tidak berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan desa.

5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kebijakan Dana Desa dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan. Kebijakan Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

Berdasarkan hasil estimasi pada model empiris, diperoleh hasil bahwa kebijakan Dana Desa dalam kurun waktu 2015-2018 berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan. Hubungan negatif antara kebijakan Dana Desa dengan jumlah penduduk miskin pedesaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Higgins (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan transfer pemerintah cenderung berdampak lebih tinggi di pedesaan.

Meskipun secara hasil estimasi pada model empiris, kebijakan Dana Desa terbukti berhubungan negatif dan signifikan pada tingkat 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan, terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana peningkatan lag pertama Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 60 orang. Hasil ini tidak lebih efektif bila dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya yang berupa Bantuan Keuangan. Menurut hasil estimasi, Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pengaruh terbesar dalam penurunan jumlah penduduk miskin dimana peningkatan lag pertama Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 125 orang. Adanya ketidakefektifan dalam hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) yang menganggap terdapat kesalahan dalam formula penyusun Dana Desa, dimana besaran Dana Desa aktual yang

didistribusikan oleh pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota sebagian besar didominasi oleh Alokasi Dasar yang merupakan porsi sama rata untuk setiap kabupaten/kota sebesar 90% dan hanya memberikan sedikit porsi pada Alokasi Formula (10%) yang memperhatikan heterogenitas daerah seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi bagi pemerintah yaitu (1) Rumus pengalokasian Dana Desa agar memberikan porsi yang lebih besar pada Alokasi Formula yang memperhatikan heterogenitas setiap daerah dimana karakteristik masing-masing daerah berbeda satu sama lain; (2) terkait dengan sumber pendapatan desa lainnya dalam bentuk Bantuan Keuangan, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat saling berkoordinasi mengenai penganggarannya, mengingat hasil empiris menunjukkan Bantuan Keuangan memiliki pengaruh terbesar dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan. Rekomendasi ini berdasarkan pada data dimana besaran Bantuan Keuangan ke desa mengalami penurunan sejak tahun 2015 dimana Dana Desa mulai dianggarkan.

Daftar Pustaka

- Adefeso, H. A. (2017). *Fiscal Federalism and Multidimensional Poverty Reduction in Nigeria : a Cross-State Analysis*. VIII(8), 1–22.
- Ahluwalia, M. S. (2007). Rural Poverty and Agricultural Performance in India. *The Journal of Development Studies*, 14(3), 298–323. <https://doi.org/10.1080/00220387808421677>
- Alene, A., & Worku, D. (2017). Does decentralization have a role in poverty reduction? The Ethiopian experience. *Journal of African Studies and Development*, 9(1), 1–6. <https://doi.org/10.5897/JASD2016.0421>
- Anam, Choirul. (2017). *Analisis Dampak Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Bangkalan*. University of Indonesia.
- Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Dau, Dak, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 218–232.
- Aref, A. (2011). Perceived impact of education on poverty reduction in rural areas of Iran. *Life Science Journal*, 8(2), 498–501.
- Azfar, O., & Livingston, J. A. (2007). *FEDERALIST DISCIPLINES OR LOCAL CAPTURE? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF DECENTRALIZATION IN UGANDA*. August.
- Balisacan, A. M., & Pernia, E. M. (2002). Probing beneath cross-national averages: Poverty, inequality, and growth in the Philippines. *ERD Working Paper Series*, 7, 1–26.
- Bergvall, D., Charbit, C., Kraan, D.-J., & Merk, O. (2006). *Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending*. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 3. Paris: OECD Publishing.
- Bird, R., & Rodriguez, E. R. (1999). Decentralization and poverty alleviation. International experience and the case of the Philippines. *Public Administration and Development*, 19(3),

- 299–319. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-162X\(199908\)19:3<299::AID-PAD82>3.0.CO;2-L](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-162X(199908)19:3<299::AID-PAD82>3.0.CO;2-L)
- Datt, G., & Ravallion, M. (1998). Farm productivity and rural poverty in India. *Journal of Development Studies*, 34(4), 62–85. <https://doi.org/10.1080/00220389808422529>
- Ekayuliana, B., Santoso, B., & Hidayati, S. A. (2019). *Village Fund Allocation and Village Fund to Reduce Poverty Rate Using Good Village Governance as Moderation in East Lombok Regency*. 8(7), 283–291.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth and poverty in rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 1038–1051. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101>
- Faridi, M. Z., & Nazar, R. (2013). *Impact of Fiscal Autonomy on Poverty in Pakistan*. 7 (1), 141–156.
- Fuad, Noor. (2004). *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta. LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Gujarati, Damodar. (2016). *Dasar-dasar Ekonometrika terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, L., & Zuber, A. (2008). Dimensi Geografis dan Pengentasan Kemiskinan Pedesaan. *Media Ekonomi*, 017.
- Hermawan, A., Istiqomah, & Ahmad, A. A. (2019). *The Effect of Village Funds on Rural Poverty : Empirical Evidence From Java Island*. 5(1), 177–183.
- Hernandez-Trillo, F. (2016). Poverty Alleviation in Federal Systems: The Case of México. *World Development*, 87, 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.012>
- Higgins, S. (2012). The impact of Bolsa Familia on poverty: Does Brazil's conditional cash transfer program have a rural bias. *Journal of Politics and Society*, 2009. <https://doi.org/10.7916/D8B27S8K>
- Jütting, J. P., Kauffmann, C., McDonnell, I., Osterrieder, H., Pinaud, N., & Wegner, L. (2004). Decentralization and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact. *SSRN Electronic Journal*, 236. <https://doi.org/10.2139/ssrn.583762>
- Kurniasih, Dewi. (2013). Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung. *Jurnal Agregasi*, 1(1), 1-14.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Village in Indonesia: Money (And Other) Mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347–359. <https://doi.org/10.1002/pad>
- Moche, T. J., Monkam, N., & Aye, G. C. (2014). Fiscal decentralization and poverty in South Africa: Evidence from panel data analysis. *Investment Management and Financial Innovations*, 11(2), 69–76.
- Nafziger, E. W. (2006). *Economic Development Fourth Edition*. Cambridge University Press, New York
- Njenga, P., & Davis, A. (2010). Drawing the road map to rural poverty reduction. *Transport Reviews*, 23(2), 217–241. <https://doi.org/10.1080/01441640309889>
- Okidegbe, N. (2001). Rural Poverty Trends and Measurement. *The World Bank Rural Development Family*.
- Padda, I. U. H., & Hameed, A. (2018). Estimating multidimensional poverty levels in rural Pakistan: A contribution to sustainable development policies. *Journal of Cleaner Production*, 197, 435–442. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.224>
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(2), 83–88. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1939>
- Pandey, L., Reddy, A. A., & others. (2012). Farm productivity and rural poverty in Uttar Pradesh: A regional perspective. *Agricultural Economics Research Review*, 25(1), 25–35.
- Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and

- income inequality in Indonesia: New evidence from village funds. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 38–42.
- Rosen, H. S., and Gayer, T. (2010). Public Finance, 8th edition. *McGraw-Hill International Editions*.
- Sayed Syahril, A. (2015). Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 54–64.
- Sigit Angga, T. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 296–311.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of The Public Sector Fourth Edition. W. W. Norton Company, Inc.
- Suryawati, C. (2005). MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan- Jurnal UGM*, 08(03).
- Todaro, M. P., and Smith, S.C. (2015). Economic Development, 11th edition. *George Washington University*.
- Valaris, N. (2012). Fiscal Decentralization and Its Effect on Poverty Evidence from Panel Data on the lower 48 American States. *ISU ReD: Research and EData*, 8, 1–22.

Lampiran 1

Pada penelitian ini telah dilakukan *robustness check* dengan mengganti variabel dependen menjadi persentase jumlah penduduk miskin pedesaan.

Tabel 3. *Robustness Check* Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Persentase Penduduk Miskin Pedesaan

	Model A	Model B
	FE	FE
	%POV	%POV
L1.DD	-0.002 (0.004)	-0.002 (0.004)
L1.ADD	0.008 (0.007)	0.001 (0.007)
L1.ratio_PAD	0.002 (0.020)	-0.021 (0.021)
L1.BK	-0.006 (0.007)	-0.005 (0.008)
L1.APBD	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)
L1.ratio_BM	-0.015 (0.023)	-0.007 (0.024)

PDRB	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
growth_popdes	0.042** (0.016)	0.043*** (0.016)
popdes	0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
ratio_labor	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)
rasio_old	0.958*** (0.257)	1.150*** (0.284)
educ	-0.000*** (0.000)	-0.000*** (0.000)
raskin	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
_cons	17.476*** (2.746)	17.058*** (3.237)
N	3649	3649
r2	0.312	0.335
r2_a	0.204	0.220
F	71.425	25.242
p	0.000	0.000
Dummy_tahun	yes	yes
Dummy_pulau_tahun	no	yes

Angka dalam tanda kurung adalah Standard Error (SE).

*** = tingkat signifikansi 1%;

** = tingkat signifikansi 5%;

* = tingkat signifikansi 10%.

Sumber: Hasil regresi, 2019

Lampiran 2

Pengujian Restriksi Persamaan Linier dengan Pendekatan Uji F (Gujarati, 2016) dilakukan yang untuk membandingkan dua model dalam penelitian.

Model A (model *restricted*)

$$\begin{aligned}
 POV_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 DD_{it-1} + \alpha_2 ADD_{it-1} + \alpha_3 ratio_PAD_{it-1} + \alpha_4 BK_{it-1} + \alpha_5 APBD_{it-1} \\
 & + \alpha_6 ratio_BM_{it-1} + \alpha_7 PDRB_{it} + \alpha_8 growth_popdes_{it} + \alpha_9 popdes_{it} \\
 & + \alpha_{10} ratio_labor_{it} + \alpha_{11} ratio_old_{it} + \alpha_{12} educ_{it} + \alpha_{13} raskin_{it} \\
 & + \beta_1 Dummy_tahun_t + \varepsilon_i
 \end{aligned}$$

Model B (model *unrestricted*)

$$\begin{aligned} POV_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 DD_{it-1} + \alpha_2 ADD_{it-1} + \alpha_3 ratio_PAD_{it-1} + \alpha_4 BK_{it-1} + \alpha_5 APBD_{it-1} \\ & + \alpha_6 ratio_BM_{it-1} + \alpha_7 PDRB_{it} + \alpha_8 growth_popdes_{it} + \alpha_9 popdes_{it} \\ & + \alpha_{10} ratio_labor_{it} + \alpha_{11} ratio_old_{it} + \alpha_{12} educ_{it} + \alpha_{13} raskin_{it} \\ & + \beta_1 Dummy_tahun_t + \beta_2 Dummy_pulau_tahun_{it} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_2 = 0$ (model A karena restriksi pada β_2)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ (model B karena tidak adanya restriksi pada β_2)

Maka uji F statistik untuk membandingkan antara dua model adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)}$$

Mengikuti distribusi F dengan m, df(n-k). dimana :

R_{UR}^2 = RSS (*Residual Sum of Squares*) dari model *unrestricted*

R_R^2 = RSS (*Residual Sum of Squares*) dari model *restricted*

m = jumlah restriksi linier

k = jumlah parameter dalam regresi yang tidak terbatas

n = jumlah observasi

maka,

$$F_{hitung} = \frac{(0,477 - 0,421)/55}{(1 - 0,477)/(3649 - 75)} = 6,96$$

Karena nilai $F_{hitung} = 6,96$ dan $F_{tabel} = 1,91$ pada level signifikansi 5% sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka tolak H_0 sehingga model terbaik adalah **Model B**.